

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN TERJADINYA RESIDIVIS (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)**

**Oleh  
ALDI DIKI SAPUTRA**

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek hukum dan sosial, salah satunya ditandai dengan tingginya angka residivisme narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui Pasal 54 telah mengamanatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis dan apakah faktor penghambat implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pengurangan terjadinya residivis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, serta dilakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tahap penyidikan dan peradilan telah dilaksanakan melalui mekanisme asesmen terpadu untuk menentukan kelayakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penerapan rehabilitasi pada prinsipnya sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan pelaku dan pengurangan residivisme. Namun, implementasi tersebut belum berjalan optimal karena rehabilitasi masih kerap diposisikan sebagai alternatif, bukan sebagai instrumen utama dalam sistem pemidanaan narkotika. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Pasal 54

*Aldi Diki Saputra*

antara lain masih kuatnya paradigma represif aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi serta beratnya biaya yang dilimpahkan kepada korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba, belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi pecandu narkoba. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam penerapan rehabilitasi, baik pada tahap penyidikan maupun dalam putusan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum memperkuat komitmen dalam menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara konsisten dengan menjadikan rehabilitasi sebagai pendekatan utama bagi penyalahguna narkoba. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas lembaga, penguatan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta perubahan paradigma melalui edukasi hukum yang berkelanjutan, guna mewujudkan sistem penegakan hukum narkoba yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pengurangan residivis.

**Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Narkoba, Residivis**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF ARTICLE 54 OF LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS AS AN EFFORT TO REDUCE RECIDIVISM (A Study at the Narcotics Investigation Directorate of Lampung Regional Police)**

**By**  
**ALDI DIKI SAPUTRA**

*Narcotics abuse is a serious issue that affects not only health aspects but also legal and social dimensions, one of which is reflected in the high rate of narcotics recidivism. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, through Article 54, mandates medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse. The problems discussed in this research are: how the implementation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics serves as an effort to reduce recidivism, and what factors hinder its implementation. This study aims to analyze the implementation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as an effort to reduce recidivism, as well as to identify the inhibiting factors in its application.*

*The research method used is normative juridical research with an empirical juridical approach. The data consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with officers of the Narcotics Investigation Directorate of the Lampung Regional Police, the National Narcotics Agency of Lampung Province, and academics from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained through library research.*

*The results of the study and discussion indicate that the implementation of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics at the investigation and judicial stages has been carried out through an integrated assessment mechanism to determine the eligibility of narcotics abusers for rehabilitation. In principle, the application of rehabilitation aligns with criminal law policies oriented toward offender recovery and the reduction of recidivism. However, its implementation has not been optimal, as rehabilitation is often positioned as an alternative rather than the primary instrument in the narcotics sentencing system. The inhibiting factors include the persistence of a repressive paradigm among law enforcement officers, limited rehabilitation facilities and infrastructure, suboptimal inter-agency coordination, and low public awareness regarding rehabilitation as a form of*

***Aldi Diki Saputra***

*protection and recovery for narcotics addicts. These conditions lead to inconsistencies in the application of rehabilitation, both at the investigation stage and in judicial decisions.*

*Based on these findings, the author suggests that law enforcement officers strengthen their commitment to consistently implementing Article 54 of Law Number 35 of 2009 by prioritizing rehabilitation as the main approach for narcotics abusers. In addition, it is necessary to enhance inter-agency coordination, improve rehabilitation facilities and infrastructure, and promote paradigm shifts through continuous legal education, in order to establish a more effective, humane, and recidivism-oriented narcotics law enforcement system.*

**Keywords: Implementation, Rehabilitation, Narcotics, Recidivism.**